

DUA MATA PISAU LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

Oleh : Tim Riset Stabilitas

Kantor Pada 16 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam milestone pembentukan sovereign wealth fund (SWF) di Indonesia. Terbentuknya kepengurusan lembaga yang merupakan turunan dari omnibus law yang kontroversial setidaknya memberikan sinyal positif bagi pemerintah dan juga para investor serta pelaku usaha. Para pemangku kebijakan menjadi lebih prudent dalam bertindak sesuai dengan kapasitas dan kepentingannya.

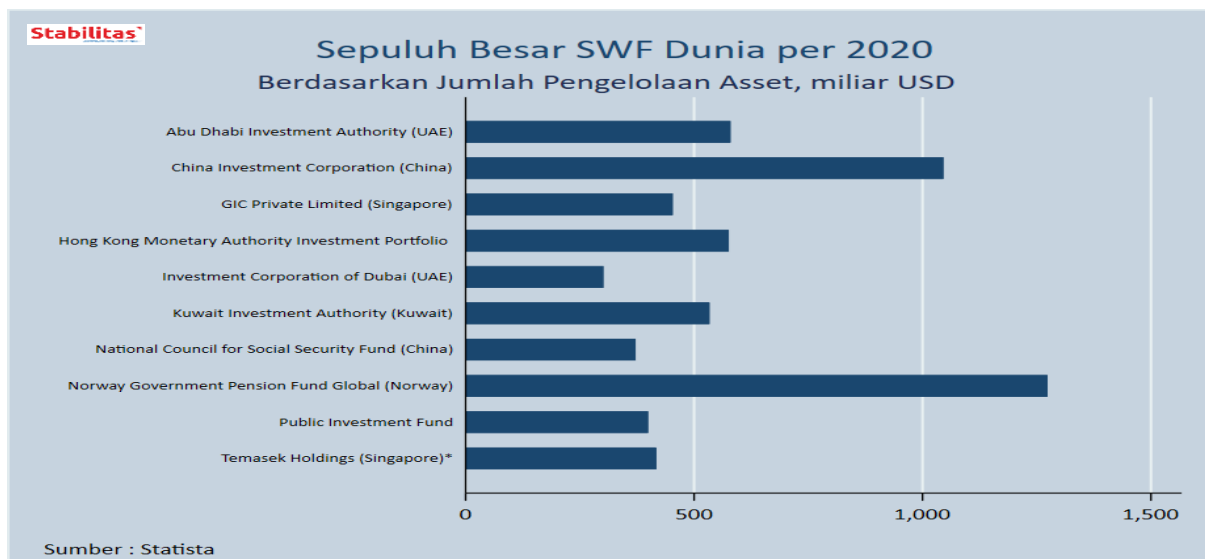
Perkembangan itu juga telah menimbulkan sinyal positif dari lantai bursa, meski hanya sesaat. Saham infrastruktur per 15 Februari 2021 berada pada level 1.022,90. Pada penutupan perdagangan 16 Februari 2021 menguat menjadi 1.022,77. Meski pada penutupan perdagangan 17 Februari 2021, saham kelompok infrastruktur melemah ke level 1.006,86. Pada perdagangan sesi pertama, saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI naik 3,5 persen dari 1.545 pada sesi pembukaan pasar menjadi 1.600. Hal yang serupa terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSK yang meningkat 4,4 persen dari 1.590 menjadi 1.660. Tidak ketinggalan saham WIKA atau PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang meningkat 2,4 persen dari 2.010 menjadi 2.060.

Di tengah euforia dan harapan atas perkembangan baru itu, keberadaan lembaga pengelola investasi itu juga bak dua mata pisau, di sisi lain memberikan dampak positif, di sisi lain bisa berdampak negatif. Indonesia Investment Authority (INA) yang bermodal Rp15 triliun dan direncanakan akan menjadi Rp75 triliun di 2022, memang secara garis besar berpotensi memberikan dampak positif bagi bertambahnya sumber pendanaan domestik di tengah kekeringan likuiditas yang melanda perekonomian nasional. Di saat yang bersamaan, lembaga LPI bisa menjadi sarang pencucian uang dan membatasi Indonesia dalam akumulasi kapital (modal) dan tabungan dalam jangka panjang.

Kehadiran Lembaga Pengelola Investasi yang diinisiasi oleh pemerintahan Joko Widodo sebagai lanjutan dari langkah menerbitkan omnibus law beberapa waktu lalu telah menimbulkan optimisme baru dalam iklim investasi. Akan tetapi publik mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan tujuan lembaga itu, terutama ketika praktik tata kelola masih lemah.



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia



Sumber Kapital

Indonesia telah menjadi negara yang terus berjuang untuk mencari kapital dalam membiayai pembangunannya, apalagi setelah pemerintahan yang memasuki periode kedua ini telah memulai ambisinya dalam sektor infrastruktur sejak 2015. Selain itu permodalan yang cukup disebut-sebut sebagai faktor yang penting dalam rangka mendorong Indonesia keluar dari middle income trap. Seperti diketahui, pada periode 2020-2040, Indonesia berada pada masa-masa bonus demografi yang juga memiliki dua mata pisau. Sisi positifnya Indonesia berlimpah sumber daya manusia atau dengan kata lain tersedianya tenaga kerja yang relatif murah. Di sisi lain apabila momentum bonus demografi tidak dimanfaatkan maka di masa depan, perekonomian Indonesia akan menanggung beban penduduk usia kurang dari 64 tahun dengan ongkos yang mahal.

Tingginya ongkos menanggung beban penduduk usia kurang dari 64 tahun adalah buah kegagalan memupuk investasi jangka panjang, merupakan buah tidak adanya saving atau tabungan yang disimpan untuk investasi jangka panjang dalam rangka memupuk dana pensiun. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan oleh minimnya saving ketika periode bonus demografi terjadi. Minimnyanyatabungan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita. Selain rendahnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan penguasaan aset juga menjadi salah satu sebabnya.

Ketimpangan aset menjadi sebab mengapa pemupukan tabungan secara agregat terhambat. Ketimpangan aset hingga pada titik ekstrem, akan menjadikan sebagian besar rumah tangga dalam perekonomian tidak bisa memiliki cukup tabungan karena aset yang sedikit. Keterbatasan aset menjadi sebab rumah tangga tidak memiliki cukup ruang untuk memupuk saving. Boro-boro menabung, untuk makan setiap hari saja masih banyak yang kerepotan, terlebih di masa covid-19.

Indonesia mengalami saving-investment gap. Dan fenomena ini sudah terjadi bertahun-tahun.

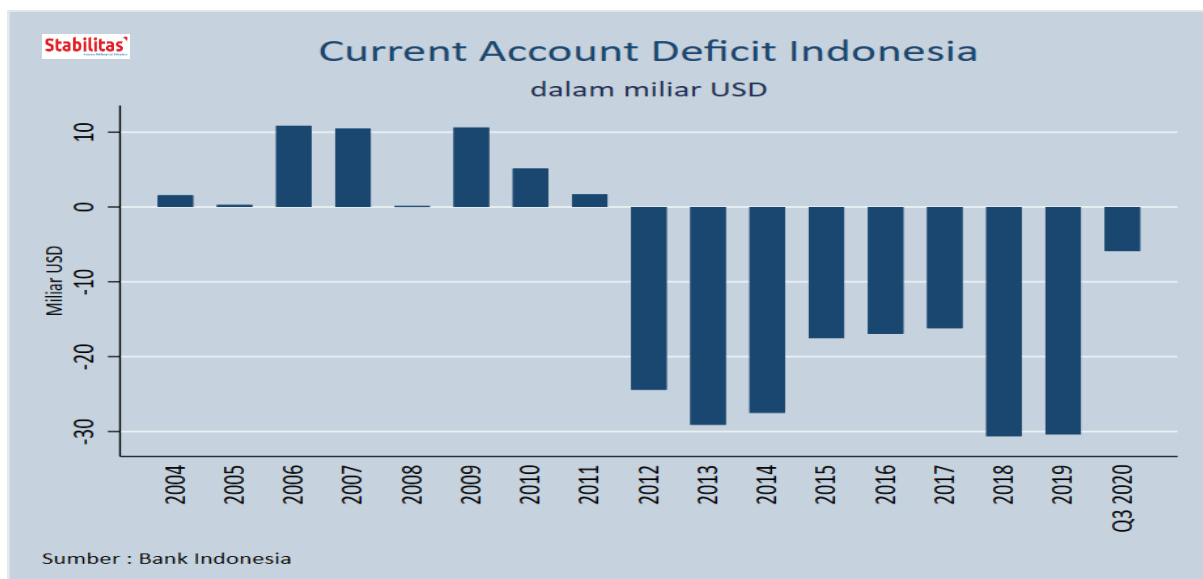


Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Gap ini mereduksi kemampuan perekonomian dalam “berlari”. Adanya celah saving-investment menjadi pertanda sumber daya kapital domestik terbatas. Padahal, sebagai analogi, kapital merupakan darah bagi perekonomian. Agar perekonomian bisa berlari kencang, maka penyakit anemia atau kurang darah harus diobati. Lembaga pengelola investasi salah satu obatnya, setelah sebelumnya ada taxamnesty yang jauh panggang dari api.

Indikator saving-investment gap bisa dilihat dari current account Indonesia. Sejak 2012 hingga kuartal ketiga tahun lalu, nilai current account Indonesia selalu mengalami defisit. Pada 2012, nilai defisit transaksi berjalan Indonesia sebesar 24,418 miliar dollar AS atau 2,65 dari nilai produk domestik brutonya. Angkanya terus meningkat di 2014 menjadi 27,48 miliar dollar AS atau sekitar 3,09 persen dari produk domestik bruto. Pada tahun 2019, nilai defisitnya mencapai 30,38 miliar dollar AS dan per kuartal ketiga 2020 mencapai 5,9 miliar dollar AS

Lebih lanjut, kesenjangan tabungan-investasi yang bernilai negatif mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya defisit transaksi berjalan yang ada akan memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar Amerika. Semakin defisit, maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika semakin kuat. Imbasnya adalah ancaman inflasi impor serta cadangan devisa yang tergerus.



Keberadaan LPI bisa berdampak negatif apabila hanya fokus pada orientasi peningkatan aset dan pertumbuhan ekonomi. Orientasi peningkatan aset harus dibarengi dengan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaan LPI. Jangan sampai kejadian Malaysia Development Berhad (IMDB) menimpa juga pada LPI. Seperti diketahui, IMDB merupakan lembaga pengelola investasi negeri Jiran yang diluncurkan pada 2009 guna mendanai pembangunan pembangkit listrik dan aset-aset energi di Malaysia dan juga Timur Tengah.

Namun, belakangan ditemukan adanya kecurigaan yang berujung pada penangkapan Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, atas dugaan korupsi di IMDB. Kecurigaan terkuak pada 2014, ketika terungkap IMDB memiliki utang sebesar 11 miliar dolar AS (Rp 160 triliun).



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Kecurigaan ini berujung pada dugaan Najib Razak secara ilegal menerima suap lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,5 triliun) terkait pengelolaan IMDB. Di tengah masih maraknya korupsi di Indonesia, kekhawatiran atas kasus IMDB yang bisa menerpa LPI adalah wajar.

Kemudian apabila LPI fokus pada mendorong angka pertumbuhan saja, maka hal tersebut akan menghalangi perwujudan pertumbuhan inklusif. Pada akhirnya hal ini akan membawa dampak pada beratnya pemupukan tabungan secara baik dan berkelanjutan. Padahal tabungan yang baik dan berkelanjutan adalah syarat mutlak dalam mewujudkan adanya sumber kapital.

Strategi

Strategi apa yang sekiranya harus dijalankan? Yang paling utama dan pertama dalam strategi pengelolaan LPI adalah bagaimana praktik good corporate governance (GCG) bisa diimplementasikan. Praktik implementasi praktik GCG pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Bagi pemerintah Indonesia, tata kelola yang baik dalam pengelolaan LPI akan memberikan citra yang baik bagi para investor dan calon investor. Harapannya, akan semakin banyak dana yang bisa dikelola oleh LPI. Bagi investor atau pemilik dana, tata kelola yang baik dalam LPI akan memberikan confident lebih atas pertaruhan dana mereka di LPI.

Strategi berikutnya adalah sebuah arah yang bisa menjadikan keberadaan LPI mendorong pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif berarti ada pemerataan hasil kue pembangunan, yang dalam hal ini yang salah satunya diperankan oleh LPI sebagai lembaga pengelola investasi. Pemerataan kue pembangunan akan mendorong lebih banyak rumah tangga untuk memiliki kemampuan menabung yang pada akhirnya secara agregat akan menjadi sumber tabungan nasional.

Setelah LPI terbentuk secara formal kelembagaan, move berikutnya adalah bagaimana mencari dana untuk dikelola. Selain menjaring dana yang datang sendiri, pengelolaan LPI juga harus mempertimbangkan pendekatan bilateral dan non bilateral. Pendekatan bilateraldiantaranya mendorong kedutaan-kedutaan besar melakukan promosi massive di negara-negara yang memiliki kelebihan dana.

Selain itu kunjungan-kunjungan kenegaraan oleh Presiden harus disisipkan agenda penawaran LPI. Pendekatan berikutnya adalah non bilateral bisa dilakukan dengan secara massive mengikuti forum-forum ekonomi dunia seperti World Economic Forum (WEF) dan sejenisnya. Forum-forum seperti ini ditujukan untuk menggaet para pemilik dana yang berasal dari sektor swasta.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Corporate Secretary

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Telp: (021) 71790919 | Email: dcsc@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer :

Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

